

## Dinamika Lembaga Penyuluhan Dan Adaptasi Penyuluh Dalam Memberikan Pelayanan Inovasi Teknologi Kepada Petani

<sup>1</sup>Reno Seprama, <sup>2</sup>Helmi, <sup>3</sup>Hery Bachrizal Tanjung  
<sup>1,2,3</sup>Sekolah Pascasarjana, Universitas Andalas, Padang  
Korespondensi : renoseprama@gmail.com

### Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dinamika perubahan kelembagaan layanan penyuluhan pertanian lokal, menganalisis kegiatan penyuluh pertanian melakukan dalam adaptasi pelayanan penyuluhan pertanian pada kondisi kelembagaan pelayanan penyuluhan pertanian lokal yang berubah, dan mengidentifikasi faktor/komponen penting kerangka kerja pelayanan penyuluhan pertanian berkelanjutan kepada petani. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena sosial di masyarakat melalui data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisa secara mendalam untuk menemukan jawaban. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pada kelembagaan pelayanan penyuluhan pertanian di tingkat desa yang langsung dirasakan oleh petani telah terjadi perubahan yang dari awalnya penyuluhan pertanian hanya dilakukan oleh penyuluh pertanian yang berada pada lembaga seperti BPP atau perusahaan swasta dengan program penyuluhan yang cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan dan minat petani. Sekarang petani mencari kebutuhan layanan penyuluhan pertanian secara mandiri tidak terbatas hanya pada penyuluh pertanian yang telah ada, petani juga mendatangi petani yang berhasil dalam mengembangkan komoditas sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Beberapa petani juga menjadi inisiator lokal untuk melakukan layanan penyuluhan berupa berbagi informasi yang berkaitan dengan usaha tani, baik tentang dana usaha, sarana produksi, cara budidaya terbaru yang terjangkau, penanganan pasca panen serta pemasaran yang berkaitan dengan komoditas yang sedang diusahakan maupun komoditas yang akan diusahakan. Adaptasi layanan penyuluhan pertanian di tingkat desa yang berhubungan langsung dengan petani dilakukan dengan mengutamakan kebutuhan petani. Petani yang memutuskan jenis usahatani yang akan dilakukan lalu layanan penyuluhan pertanian mengikuti sesuai dengan keputusan petani tersebut. Kerangka kerja penyuluhan pertanian yang diperoleh dari penelitian ini berupa penyuluhan pertanian yang mengutamakan keuntungan bagi petani dengan penyesuaian pada sumberdaya yang tersedia dan pengelolaan inovasi yang dilakukan secara menyeluruh untuk satu jenis usahatani.

**Kata kunci:** Dinamika lembaga, adaptasi penyuluh, pelayanan inovasi

### Abstract

The aims of the study were to analyze the dynamics of institutional changes in local agricultural extension services, to analyze the activities of agricultural extension services in adapting agricultural extension services to changing local agricultural extension service institutional conditions, and to identify important factors/components of the framework for sustainable agricultural extension services to farmers. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Qualitative research aims to describe social phenomena in society through data collected and then analyzed in depth to find answers. Based on the results of the research and discussion, the following conclusions can be drawn: In the agricultural extension service institutions at the village level, which are directly felt by farmers, there has been a change, from the start, agricultural extension was only carried out by agricultural extension workers who were in institutions such as BPP or private companies with extension programs that tend not to suit the needs and interests of farmers. Now farmers are looking for the need for agricultural extension services independently, not limited to existing agricultural extension agents, farmers are also visiting farmers who are successful in developing commodities according to their needs and interests. Some farmers are also local initiators to carry out extension services in the form of sharing information related to farming, both regarding business funds, production facilities, the latest affordable cultivation methods, post-harvest handling and marketing

*related to commodities that are being cultivated and commodities that will be cultivated. Adaptation of agricultural extension services at the village level that deal directly with farmers is carried out by prioritizing the needs of farmers. Farmers decide on the type of farming to be carried out, then agricultural extension services follow according to the farmer's decision. The agricultural extension framework obtained from this research is in the form of agricultural extension which prioritizes profits for farmers by adjusting the available resources and managing innovations carried out as a whole for one type of farming.*

**Keyword:** *Institutional dynamics, adaptation of extension agents, service innovation*

## 1. PENDAHULUAN

Permasalahan penyuluhan pertanian di Indonesia saat ini, khususnya penyuluhan yang dilakukan oleh instansi pemerintah adalah jumlah penyuluh pertanian yang cenderung berkurang setiap tahun, lembaga yang menaungi penyuluhan pertanian yang beragam di setiap daerah provinsi dan kabupaten/kota, alokasi anggaran dan fasilitas kerja yang tidak memadai. Kondisi ini diperburuk oleh menurunnya pembinaan terhadap penyuluh, sehingga ketrampilan penyuluh mengalami stagnasi dan bahkan cenderung menurun (Mardianto, 2014).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Moordiani, dkk. (2018), Jumlah penyuluh pertanian PNS berkurang paling besar karena memasuki masa purna tugas/pensiun, sebab lain karena tugas belajar, alih tugas menjadi pejabat struktural, sedangkan rekrutmen penyuluh pertanian baru tidak ada. Dengan laju penurunan jumlah penyuluh pertanian PNS di Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun 2013 s/d 2017 berkurang sebanyak 622 orang atau 26,37%. Sedangkan selama Januari– Desember 2017 berkurang sebanyak 298 orang (14,64%).

Penyuluh pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyuluhan sebagai ujung tombak pembangunan pertanian karena paling dekat dengan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Penyuluh harus mampu menjadi fasilitator bagi petani untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan serta mau mengadopsi informasi teknologi yang disampaikan. Harapannya petani mampu mengakses modal dan pasar sehingga memecahkan permasalahannya dan meningkatkan pendapatan serta kehidupan yang lebih baik (Inten, dkk., 2017).

Menurut Syahyuti (2016), masalah yang akan dihadapi bila kelembagaan penyuluhan lemah adalah masalah manajemen dan efektivitas pembangunan pertanian. Hal ini akan berdampak pada ketidakefektifan serta pembinaan tenaga penyuluhan yang tidak berjalan baik.

Perubahan lembaga penyuluhan ini juga berdampak terhadap program penyuluhan dan biaya operasional penyuluhan yang ada dalam program pembangunan pertanian menjadi berkurang. Kebanyakan program yang dibuat oleh kementerian pertanian maupun dinas pertanian yang ada di daerah hanya terbatas pada pengadaan fisik berupa alsintan atau pun pembangunan irigasi, persoalan peningkatan sumberdaya manusia petani sendiri sering terlupakan. Alokasi program untuk pelatihan penyuluh pertanian juga sangat kurang, bahkan dalam setahun seorang penyuluh pertanian tidak diikutkan dalam satu kegiatan pelatihan apa pun untuk peningkatan kapasitas penyuluh bersangkutan. Begitu juga dengan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang sangat minim, di beberapa daerah alokasi anggaran untuk operasional Balai Penyuluhan Pertanian yang ada di Kecamatan sangat sedikit bahkan hampir tidak ada sehingga ada BPP yang tidak lagi bisa memfasilitasi kebutuhan petani akan tempat pelatihan dan pertemuan dengan sumber informasi dan teknologi pertanian maupun pasar.

Perubahan bentuk lembaga yang menangani layanan penyuluhan pertanian di daerah memberikan tantangan terhadap pelaksanaan penyuluhan pertanian. Sebelum pelaksanaan UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, penyuluhan pertanian memiliki Badan Pelaksana Penyuluhan di tingkat Kabupaten/Kota. Penyuluhan pertanian setelah penerapan undang-undang tersebut kembali terpisah sesuai dengan dinas teknis masing-masing sesuai komoditas, sehingga efektivitas penyuluhan rendah dan kurang terkoordinasi. Namun penyuluh pertanian tetap dituntut untuk melaksanakan penyuluhan pertanian dengan dukungan sarana, prasarana, dan keuangan yang minim. Petani, terutama petani kecil tetap membutuhkan penyuluhan pertanian untuk kelangsungan usahatani.

Akibat dari perubahan kelembagaan layanan penyuluhan pertanian, jumlah penyuluh pertanian yang semakin berkurang, dan kurangnya dukungan pendanaan biaya operasional penyuluhan adalah layanan penyuluhan pertanian berupa informasi teknologi dan inovasi usahatani bagi petani menjadi berkurang. Dengan berbagai tantangan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian saat ini, sementara penyuluhan pertanian tetap harus dilaksanakan dengan atau tanpa bantuan pemerintah. Oleh karena itu perlu suatu solusi agar kegiatan peningkatan sumberdaya manusia pertanian khususnya petani terus dapat dilakukan pada masa perubahan ini melalui penyuluhan pertanian, maka penyuluh pertanian perlu melakukan adaptasi terhadap permasalahan anggaran penyuluhan yang minim.

Sementara itu usaha pertanian mengalami perubahan lebih banyak didorong oleh pemerintah daripada respon petani untuk memperoleh pendapatan (didorong pasar). Dalam kondisi seperti itu perlu dipahami dinamika layanan penyuluhan dan identifikasi faktor penting untuk membangun kerangka kerja pelayanan penyuluhan yang sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sektor pertanian, usahatani, dan permintaan pasar.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu (1) menganalisis dinamika perubahan kelembagaan layanan penyuluhan pertanian lokal; (2) menganalisis kegiatan penyuluh pertanian melakukan dalam adaptasi pelayanan penyuluhan pertanian pada kondisi kelembagaan pelayanan penyuluhan pertanian lokal yang berubah; (3) mengidentifikasi faktor/komponen penting kerangka kerja pelayanan penyuluhan pertanian berkelanjutan kepada petani.

## 2. METODE

Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Sedangkan M. Nazir menambahkan bahwa pengumpulan data dengan metode observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa adanya bantuan alat standar lain untuk keperluan tersebut.

Terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian, metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan di wilayah kerja penyuluh pertanian yang diteliti. Dengan demikian peneliti terjun langsung ke lapangan atau pada sebuah organisasi dengan mengadakan pengamatan (melihat, mendengar, dan bertanya) dan mencatat keadaan yang terjadi pada wilayah tersebut.

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab dengan subyek penelitian tentang permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam (*in-depth interview*). Esterberg dalam Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Tipe wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat semi terstruktur (*semi structure interview*).

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2015). Penelitian ini menggunakan analisis data Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclusion drawing/verification*.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Dinamika Kelembagaan Layanan Penyuluhan Pertanian

Berdasarkan hasil penelitian kelembagaan layanan penyuluhan pertanian yang ada diketahui bahwa skala dan kompleksitas tugas penyuluhan dapat dipahami dalam hal jumlah, distribusi, dan keragaman staf, petani, dan serta pemangku kepentingan lainnya. Hal ini terlihat dari data jumlah penyuluh pertanian, kelompok tani, dan petani pada Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian, Pusat Penyuluhan Pertanian, BPPSDMP, Kementerian Pertanian pada Juni tahun 2021 masing-masing kabupaten/kota lokasi kasus yang diteliti pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah penyuluh pertanian, kelompok tani, dan petani pada kabupaten/kota lokasi kasus yang diteliti

No	Kabupaten / Kota	Penyuluh Pertanian			Total	Jumlah Poktan	Jumlah Petani
		PNS	THL	Lainnya			
1	Sawahlunto	34	5	31	70	307	6,036
2	Solok Selatan	59	0	55	114	1,304	22,123
3	Pasaman Barat	57	78	29	164	1,527	39,143

Pada data tabel di atas penyuluh pertanian terdiri dari penyuluh pertanian pegawai negeri sipil (PNS), tenaga harian lepas (THL), dan penyuluh pertanian lainnya yang merupakan penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta. Penyuluh pertanian PNS dan THL dibiayai oleh pemerintah, sedangkan penyuluh pertanian swasta dibiayai oleh perusahaan swasta dan penyuluh pertanian swadaya dilakukan secara mandiri. Penyuluh pertanian PNS bertanggung jawab untuk melakukan penyuluhan pada semua kelompok tani dan petani yang ada pada daftar tersebut dengan dibantu penyuluh pertanian THL. Sedangkan penyuluh pertanian lainnya bisa memilih secara mandiri petani atau kelompok tani yang akan diberikan layanan penyuluhan pertanian oleh mereka. Dari data tersebut terlihat tanggung jawab pelayanan penyuluhan pertanian terbesar berada pada penyuluh pertanian dengan proporsi tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat 44,91 kelompok tani per penyuluh, sedangkan di Kabupaten Solok Selatan 38,35 kelompok tani per penyuluh dan di Kota Sawahlunto 9,02 kelompok tani per penyuluh. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh pertanian di daerah penelitian menyatakan penyuluh pertanian selain melaksanakan kewajiban layanan penyuluhan pertanian juga dibebani dengan tugas-tugas lainnya yang tidak berkaitan dengan fungsi penyuluhan pertanian seperti pengawasan penyaluran pupuk subsidi, pencatat statistik pertanian, input data SIMLUHTAN, dan tugas tambahan lainnya.

Hal ini sesuai dengan kajian Anderson dan Feder (2003) bahwa banyak kegagalan administratif dan desain yang telah terbukti sangat bermasalah dalam upaya penyuluhan publik di masa lalu, terutama yang terkait dengan: skala dan kompleksitas operasi penyuluhan; ketergantungan keberhasilan dalam perluasan pada lingkungan kebijakan yang lebih luas

Masalah yang berasal dari interaksi penyuluhan yang kurang ideal dengan sistem pengembangan pengetahuan; kesulitan yang melekat dalam menelusuri dampak penyuluhan; masalah akuntabilitas yang mendalam; komitmen dan dukungan politik yang seringkali lemah untuk penyuluhan publik; seringnya dibebani dengan tugas-tugas publik selain yang terkait dengan transfer pengetahuan; dan kesulitan berat dari ketidakberlanjutan fiskal yang dihadapi di banyak negara.

## **B. Adaptasi Pelayanan Penyuluhan Pertanian**

Penyuluhan pertanian menghadapi setidaknya dua tantangan di sektor pertanian harus dianggap lebih penting yaitu informasi dan organisasi. Orang-orang yang terlibat dalam pertanian membutuhkan peningkatan keterampilan, informasi, dan gagasan untuk mengembangkan pertanian yang akan memenuhi pola permintaan yang kompleks, mengurangi kemiskinan, dan melestarikan atau meningkatkan sumber daya ekologis. Penyuluhan pertanian memiliki peran penting untuk dimainkan.

Pengembangan kawasan Minyak Atsiri di Desa Balai Batu Sandaran ini awalnya merupakan pengembangan dari hasil penelitian demplot oleh Balai Penelitian Kementerian Pertanian yang menunjukkan hasil kandungan citronela yang tinggi. Hasil penelitian ini didukung oleh pemerintahan kota Sawahlunto untuk dikembangkan lebih lanjut untuk pemanfaatan areal di Desa Balai Batu Sandaran yang belum produktif. Kelompok tani sebagai penerima manfaat diajarkan Teknik budidaya dan penyulingan serai wangi, namun setelah program pendampingan selesai kelompok tani tidak mampu menjalankan usaha minyak atsiri tersebut secara berkelompok. Salah satu anggota kelompok tani bernama Adri Doni menawarkan diri sebagai pengelola dengan sistem bagi hasil 5% dari hasil penyulingan untuk kelompok. Adri Doni inilah yang menjalankan usaha penyulingan dan menanam serai wangi pada sebagian areal milik kelompok. Dia juga mengajak petani lain untuk ikut menanam serai wangi, hasil panennya akan dibeli dengan sesuai perkembangan harga pasar. Dia juga menyediakan bibit serai wangi bagi petani yang berminat.

Pengembangan kawasan kopi di Kecamatan Sangir ini melibatkan penyuluh pertanian untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan standar *good agricultural practice* (GAP) budidaya kopi. Saat ini produktifitas kopi petani belum optimal karena masih banyak petani yang belum menerapkan cara budidaya kopi yang baik, sehingga tugas penyuluh pertanian melakukan penyuluhan kepada petani melalui kelompok tani yang ada. Untuk panen, petani belum semuanya menerapkan panen merah. Panen merah bertujuan untuk memberikan rasa dan aroma kopi yang kuat pada produk. Untuk memperbaiki permasalahan panen ini, selain penyuluh memberikan pemahaman kepada petani tentang pentingnya kualitas panen, pelaku usaha pengolahan kopi juga memberikan insentif kepada petani yang memanen kopi berkualitas dengan harga yang lebih dari kopi yang dipanen asalan. Penyuluh dan petani mengidentifikasi permasalahan dalam budidaya kopi, lalu berusaha menyelesaikan permasalahannya. Apabila penyuluh dan petani tidak mampu, maka akan diteruskan ke Dinas Pertanian, untuk memfasilitasi mendatangkan narasumber maupun untuk mengunjungi daerah lain yang lebih maju dalam bidang kopi.

## **C. Kerangka Kerja Pelayanan Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan**

Berdasarkan hasil temuan penelitian, transformasi kelembagaan penyuluhan pertanian pada kasus yang diamati sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan sosial, fungsional, dan politik. Transformasi ini menghasilkan kerangka kerja penyuluhan pertanian yang bisa dilaksanakan pada situasi perubahan. Kerangka kerja penyuluhan pertanian tersebut berupa inisiator lokal yang diikuti oleh organisasi penyuluhan yang ada. Inisiator lokal bisa berasal dari petani, penyuluh pertanian, atau pelaku usaha. Pada model ini ketergantungan dengan sokongan dari pemerintah tidak menjadi hal paling utama. Model ini mengutamakan kemampuan untuk memanfaatkan potensi usahatani yang ada di suatu daerah.

Pada usahatani tersebut perlu dilakukan inovasi agar bisa memberikan nilai lebih dan pembeda dari usahatani yang telah ada. Model inisiator lokal ini paling dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi karena sudah mencirikan sistem penyuluhan pertanian yang berbasis kepentingan petani. Menurut Widjaja dan Winarso (2019) inovasi merupakan proses atau hasil pengembangan dan atau pemanfaatan dari pengetahuan keterampilan (termasuk keterampilan teknologi) dan pengalaman guna menciptakan atau memperbaiki produk maupun proses guna memberikan nilai yang lebih berarti.

Dalam pelayanan penyuluhan pertanian terdapat beberapa pihak yang terlibat. Masing-masing pihak memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Walaupun sekilas terlihat bahwa masing-masing pihak sepertinya memiliki tujuan yang berbeda-beda namun apabila kita lihat dengan seksama maka akan terlihat keterkaitan antara tujuan mereka masing-masing. Keterkaitan tujuan antara satu pihak dengan pihak lainnya terletak pada tujuan dasarnya yaitu bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (petani) yang juga merupakan tujuan utama dari penyuluhan pertanian. Dengan adanya kesamaan tujuan dari multipihak tersebut maka dari berbagai pihak tersebut dapat saling bekerja sama dalam mencapai tujuan. Dibutuhkan kerjasama antara pihak-pihak yang berkepentingan sehingga pelaksanaan program yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani ini dapat terwujud. Pihak – pihak dengan spesialisasi masing-masing saling bantu dan bekerja sama dalam memberikan kontribusinya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Kolaborasi ini memiliki tujuan untuk mendukung semua pihak secara efektif bekerjasama satu sama lain. Semua pihak dapat dengan mudah membagi informasi, mendiskusikan persoalan, dan berujung pada pencapaian tujuan sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan kualitas dari proses penyuluhan itu sendiri. Kolaborasi ini juga mendukung semua pihak untuk membangun dan berbagi pengetahuan sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan interaksi diantara pihak. Kolaborasi juga akan menstimulasi proses berbagi pengetahuan dalam jaringan kelompok dari kesulitan yang muncul dengan cara mencari penyelesaian yang baik dan relevan dengan cara berinteraksi diantara pihak yang berkolaborasi. Sistem inovasi tradisional yang lebih mengandalkan penyediaan teknologi dari lembaga riset (khususnya lembaga riset publik) dinilai sudah tidak memadai untuk merespon dinamika preferensi konsumen dan pasar. Untuk dapat merespon keinginan pasar dan konsumen, sejak akhir 1980an mulai dikembangkan konsep sistem inovasi yang pada intinya adalah pelibatan banyak pelaku dan lembaga yang berinteraksi secara dinamis dan fleksibel (Taufik, 2005).

Pada kasus penyuluhan pada komoditas serai wangi di Kota Sawahlunto, saat ini sebagian areal kelompok tani dan beberapa lahan petani tidak produktif, hal ini terbuka peluang untuk penanaman serai wangi di areal tersebut. Untuk areal kelompok tani yang belum ditanami perlu di tanam ulang, apakah anggota yang lain dari kelompok tani Berkat Yakin yang akan mengolahnya atau petani lain yang berminat menanam serai wangi pada areal tersebut dengan sistem bagi hasil atau sewa. Petani lain yang memiliki lahan tidak produktif saat ini juga bisa melakukan kerjasama dengan Adri Doni, dengan sistem Adri Doni menyediakan bibit secara gratis dengan kesepakatan saat panen daunnya dijual kepada dia. Alat penyulingan juga belum beroperasi optimal, baru mengolah 20% dari kapasitas alat penyulingan yang ada. Adri Doni menawarkan pilihan untuk mengoptimalkan kapasitas alat penyulingan dengan menjamin untuk membeli hasil panen daun serai wangi dari petani atau kalau mau titip olah juga bisa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan “AD” di lokasi penyulingan Desa Balai Batu Sandaran pada 7 Oktober 2019 yang mengungkapkan bahwa dia menawarkan untuk membeli hasil panen dengan harga Rp.600 per kilogram daun serai wangi atau menerima jasa penyulingan dengan biaya 30% dari minyak yang dihasilkan.

*Awak agiah ka urang punyo itu pilihan bantuak itu bisa inyo manjua gambah bisa inyo manumpang manyuliang sajo, iyo kalau ambo rasa mode kini mode harago pitih 600 sakali bali. Iyo kalau inyo numpang manyuliang sajo awak agiah kan, apa ambok daun dari apak kamari ambo suliang disiko tapi ambo bisa manarimo yang sajenis pa'a kalau itu apak bawa kamari ambo bantu manyuliangan beko kalau dapeik minyak 10 kilo dari apak itu yang 7 kilo ambo pulangin ka apak yang 3 kilo ambo tinggain disiko.* (Saya memberi petani pilihan seperti itu bisa dia menjual gabah, bisa dia menumpang menyuling saja, iya kalau saya rasa mode kini harga Rp.600/kg. Iya kalau dia menumpang menyuling saja saya persilahkan, bapak bawa kemari daunnya, saya sulingkan di sini, tapi saya bisa menerima yang sejenis pak kalau itu bapak bawa kemari saya bantu menyulingkan nanti kalau dapat minyak 10 kilogram saya berikan yang 7 kilogram sedangkan 3 kilogram untuk saya) (**“AD”, pengelola alat penyulingan**)

Penyuluh pertanian bisa berperan untuk menggerakkan kelompok tani atau petani untuk memanfaatkan areal yang belum produktif dengan menanam serai wangi. Sekaligus menjadi penghubung dengan Adri Doni dalam hal penampungan hasil panen. Limbah padat sisa perebusan memiliki peluang untuk dijadikan pakan ternak sapi, karena memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Hal ini membuka peluang kerjasama dengan peternak sapi. Pihak penampung hasil minyak atsiri dari kawasan ini perlu diajak untuk bekerjasama dalam menyediakan modal bagi petani menanam serai wangi, karena kandungan citronela pada serai wangi yang dihasilkan dari kawasan ini cukup tinggi. Kualitas minyak atsiri /citronella oil diperoleh dari hasil penyulingan daun tanaman sereh wangi (*Cymbopogon nardus* L.) yang dihasilkan oleh alat penyulingan yang ada di Desa Balai Batu Sandaran ini mencapai 37%, hal ini sangat baik karena telah berada di atas angka SNI 35%. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan “AD” di lokasi penyulingan Desa Balai Batu Sandaran pada 7 Oktober 2019 yang mengungkapkan bahwa kandungan minyak citronella yang dihasilkan mencapai 37% :

*Di tes lab kadar air, lai memenuhi engga kadar citro, nilainyo lai di ateh standart SNI, iko alah hasil lab itu bisuak sehari, hari kini kalau tibo awak dibawah jam 12 sore masuk langsung 75% itu yang 25% nyo salambek-lambeknyo kalo hari senin awak antaan sampai lambeknyo rabu pagi itu masuk inyo tinggallah gaji inyo punya alat surang kalau mintanyo inyo punya alat surang tuh, kalau model panorama standar nasional indonesia untuk souvenir lai kan 35 pak, kalau di panorama itu 37 sadonyo.* (Di tes laboratorium kadar air, sudah memenuhi kadar citro, nilainya sudah di atas standar SNI, ini sesudah hasil lab itu besok sehari, kalau barang diterima sebelum jam 12 siang, sore harinya langsung dibayarkan 75%, sedangkan sisanya 25% akan dikirimkan selambat-lambatnya kalau hari senin kita mengantarkan barang, hari rabu pagi itu dikirimkan sisa pembayarannya. tinggallah gaji dia punya alat sendiri kalau mintanya dia punya alat sendiri tuh, kalau model PT Panorama standar nasional indonesia untuk souvenir lai kan 35 pak, kalau di PT Panorama itu 37 semuanya.) (**“AD”, pengelola alat penyulingan**)

Pada kasus penyuluhan pada komoditas Kakao di Kota Sawahlunto, peluang keterlibatan multipihak sangat terbuka lebar. Saat ini sebagian besar tanaman kakao petani dalam kondisi kurang terawat sehingga produksi secara keseluruhan menurun dan produktivitas lahan yang rendah. Hal ini mengakibatkan pendapatan petani dari tanaman kakao juga menurun. Pemerintah telah melakukan beberapa usaha untuk meningkatkan produksi kakao petani, antara lain dengan memberikan bantuan berupa bibit, pupuk, alat panen, alat pasca panen, dan pelatihan. Namun hal ini belum mampu mendorong petani kakao mampu memproduksi secara optimal. Alat fermentasi biji kakao di kelompok tani yang diberikan oleh pemerintah belum beroperasi optimal, baru mengolah sebagian kecil dari kapasitas fermentasi yang ada di kelompok. Sehingga biji kakao yang dihasilkan oleh petani masih dijual dengan harga yang rendah.

Penyuluh pertanian bisa berperan untuk menggerakkan kelompok tani atau petani untuk berkolaborasi memproduksi kakao yang difermentasi sehingga bisa dipasarkan ke daerah lain yang memiliki harga lebih tinggi. Limbah padat sisa kulit kakao juga memiliki peluang untuk dijadikan pakan ternak sapi, karena memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Hal ini membuka peluang kerjasama dengan peternak sapi. Pihak penampung hasil panen kakao dari kawasan ini perlu diajak untuk bekerjasama dalam mendorong petani menghasilkan biji kakao yang berkualitas dengan membeli biji kakao yang telah difermentasi oleh petani dengan harga yang lebih dari biji kakao tidak difermentasi.

Sehingga bisa memenuhi permintaan pabrik pengolahan biji kakao yang mau membeli dengan harga yang lebih tinggi dari saat ini. Sedangkan pada kasus penyuluhan pada komoditas ayam kampung di Kabupaten Solok Selatan peluang keterlibatan berbagai pihak masih terbuka lebar, karena usaha ini masih pada tahap pengembangan sehingga butuh layanan penyuluhan yang lebih banyak daripada saat ini. Hasil penelitian menunjukkan usaha pengembangan ayam kampung di Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh ini masih dalam tahap awal, sehingga sangat bisa melibatkan pihak-pihak lain untuk turut serta dalam usaha ini. Saat ini mereka masih menghadapi kendala dalam optimalisasi kapasitas alat penetas yang ada, karena keterbatasan telur untuk ditetaskan. Hal ini perlu kolaborasi dengan masyarakat sekitar yang memiliki lahan yang bisa dijadikan areal beternak ayam kampung untuk memproduksi telur ataupun masyarakat yang memiliki indukan ayam kampung. Mereka juga masih sering menghadapi wabah penyakit yang menyerang ternak mereka, bahkan sampai mengakibatkan kematian yang menghabiskan ayam indukan. Hal ini mereka perlu berkolaborasi dengan petugas kesehatan hewan dan instansi terkait lainnya untuk pengendalian penyakit pada ternak ayam kampung. Dalam hal pemasaran ayam kampung pedaging mereka juga masih terbatas pada konsumen rumah tangga, untuk konsumen produk olahan daging ayam kampung mereka belum bisa memenuhi kuota harian dan keberlanjutan pasokan. Hal ini perlu berkolaborasi dengan peternak lain dalam hal pengaturan sumberdaya, jumlah dan waktu budidaya ayam kampung sehingga bisa memproduksi ayam kampung pedaging dengan jumlah yang cukup untuk konsumen produk olahan daging ayam kampung. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan “M” di lokasi peternakan Nagari Pakan Rabaa pada 26 September 2019 yang mengungkapkan bahwa permintaan akan produk ayam kampung ini cukup tinggi bahkan belum terpenuhi.

#### 4. KESIMPULAN

Pada kelembagaan pelayanan penyuluhan pertanian di tingkat desa yang langsung dirasakan oleh petani telah terjadi perubahan yang dari awalnya penyuluhan pertanian hanya dilakukan oleh penyuluh pertanian yang berada pada lembaga seperti BPP atau perusahaan swasta dengan program penyuluhan yang cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan dan minat petani. Sekarang petani mencari kebutuhan layanan penyuluhan pertanian secara mandiri tidak terbatas hanya pada penyuluh pertanian yang telah ada, petani juga mendatangi petani yang berhasil dalam mengembangkan komoditas sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Beberapa petani juga menjadi inisiator lokal untuk melakukan layanan penyuluhan berupa berbagi informasi yang berkaitan dengan usaha tani, baik tentang dana usaha, sarana produksi, cara budidaya terbaru yang terjangkau, penanganan pasca panen serta pemasaran yang berkaitan dengan komoditas yang sedang diusahakan maupun komoditas yang akan diusahakan.

Adaptasi layanan penyuluhan pertanian di tingkat desa yang berhubungan langsung dengan petani dilakukan dengan mengutamakan kebutuhan petani. Petani yang memutuskan jenis usahatani yang akan dilakukan lalu layanan penyuluhan pertanian mengikuti sesuai dengan keputusan petani tersebut.



Kerangka kerja penyuluhan pertanian yang diperoleh dari penelitian ini berupa penyuluhan pertanian yang mengutamakan keuntungan bagi petani dengan penyesuaian pada sumberdaya yang tersedia dan pengelolaan inovasi yang dilakukan secara menyeluruh untuk satu jenis usahatani.

## 5. SARAN

- 1) Diperlukan pemahaman yang benar tentang kelembagaan penyuluhan pertanian oleh semua pihak, sehingga terbentuk suatu norma, aturan, dan interaksi yang efektif dalam penyuluhan pertanian.
- 2) Diperlukan kajian lebih lanjut tentang kerangka kerja penyuluhan pertanian yang berkelanjutan pada berbagai situasi penyuluhan pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] BPPSDMP. 2015. Rencana Strategis 2015-2019 Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian pertanian.  
<http://bppsdmp.pertanian.go.id/storage/app/media/file%20berita/Renstra%20BPPSDMP%202015%20-%202019%20Revisi%20Ke%2022.pdf> . [Diakses 19 Januari 2019]
- [2] Mardianto, S. 2014. Reformasi sistem inovasi pertanian di Indonesia.  
<http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/reformasi-kebijakan-menuju/BAB-IV-10.pdf> . [Diakses 19 Januari 2019]
- [3] Feder, G., Anderson, J.R., Birner, R. and Deininger, K., 2010. *Promises and realities of community-based agricultural extension*. In *Community, Market and State in Development* (pp. 187-208). Palgrave Macmillan, London.
- [4] Inten S,M, D. Elviana, B.R. Nover. 2017. Peranan Penyuluh Pertanian Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Komoditas Padi Di Kecamatan Tanjung selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. *J. Agrifor* 16 (1) : 103 - 108, Maret 2017.
- [5] Moleong, J. Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- [6] Moordiani, R., Wildani, A., & Widayani, S. 2018. Analisis Kebutuhan Penyuluh Pertanian Mendukung Jawa Tengah Menjadi Lumbung Pangan Nasional. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian UNS* (Vol. 2, No. 1, pp. C-53).